



## SPMI SEBAGAI PENJAMIN TOTAL QUALITY MANAGEMENT INSTITUSI

Oleh

Y. Touvan Juni Samodra<sup>1</sup>, Sesilia Seli<sup>2</sup>, Lily Thamrin<sup>3</sup>, Asriah Nurdini  
Mardiyarningsih<sup>4</sup>, Uray Gustian<sup>5</sup>, Rio Pranata<sup>6</sup>, Dwi Riyanti<sup>7</sup>, Putri Tipa Anasi<sup>8</sup>, Dian  
Miranda<sup>9</sup>

<sup>1)9)</sup> Universitas Tanjungpura  
[tovan@fkip.untan.ac.id](mailto:tovan@fkip.untan.ac.id)

diterima 11 Oktober 2022, direvisi 18 Februari 2023, diterbitkan 28 Februari 2023

### *Abstract*

*Higher education's internal quality assurance system (IQAS) has regulated both the mechanism and the final achievement. To provide quality educational services, one of the pieces of evidence is the existence of an accreditation level status. The accreditation level status results from a quality culture reflected in good reporting following the planned conditions and achievements achieved. This effort is not wholly running smoothly. The change of different criteria in the output-based BAN-PT Accreditation is a challenge that forces a change in work patterns and reporting. Availability of standards, output targets, and outputs must be measurable in each criterion. Several things are still obstacles, so that the implementation of IQAS is significantly related to achievement standards, ease of accessing information, and document renewal which must adjust changes to the nine criteria. IQAS's efforts were carried out as preparation for external quality assurance as an institution's accountability to stakeholders.*

**Keywords:** *IQAS, Accreditation. Nine criterions.*

### **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50) bahwa pengelolaan Pendidikan nasional didasarkan atas kebijakan nasional dan standar nasional untuk menjamin mutu Pendidikan nasional. Kebijakan tersebut dikuatkan lagi dalam pasal 51 ayat (2)

menjelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Selanjutnya pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 52 dinyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan

berkelanjutan, serta penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui prinsip penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar Pendidikan Tinggi.

Kinerja lembaga pendidikan Tinggi dipertanggungjawabkan secara resmi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT dan stakeholder, dan diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi hal ini juga diperjelas dalam Permenristek no 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ketercapaian setiap standar ini kemudian di cek secara langsung oleh lembaga Independen yaitu Badan Akreditasi Nasional (BAN). Pada kurun waktu sebelum ditetapkan 9 kriteria (tahun 2018 standar layanan sebuah prodi dinyatakan dengan 7 standar).

## II. PEMBAHASAN

Penjaminan mutu tidak saja diberlakukan untuk perguruan tinggi tetapi juga diberlakukan di sekolah (Haryono, H., Budiyo, B., Istyarini, I., Wardi, W., & Ardiantoro 2019). Beberapa komponen penting agar proses SPMI berlangsung dengan baik diantaranya ketersediaan kebijakan, adanya unit atau pengelola penjaminan mutu, rencana siklus penjaminan mutu, kebijakan kaitan dengan mutu auditor yang berkualitas, evaluasi pelaksanaan SPMI, Penggunaan hasil SPMI dan pengembangan mutu sesuai dengan standar (Sulaiman, A., & Wibowo 2016) (Fadhli 2020). Selanjutnya proses ini dilaksanakan secara berkesinambungan (Arifudin 2019). Proses penjaminan mutu yang dilakukan jika dipergunakan dengan baik dapat untuk meningkatkan mutu akademik ataupun non akademik (Darmaji, D., Supriyanto, A., & Timan 2019). Kinerja perguruan tinggi harus menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan penelitian dapat diketahui gap yang terjadi antara standar dengan yang sebenarnya terjadi (Supriyono 2018).

Sebuah penelitian membuktikan bahwa untuk meningkatkan penerapan SPMI-PT secara efektif dan berkelanjutan

diperlukan data evaluasi yang telah dilakukan (Willar, D., Linton, J., & Kaparang 2015), hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam kegiatan penjaminan mutu, dengan siklus PPEPP salah satu bagian di dalamnya adalah upaya memberikan data riil kondisi yang ada untuk memberikan masukan paa proses yang akan datang. Upaya ini dapat dilakukan secara terpisah melalui jalur penelitian pelaksanaan SPMI.

Penilaian level status akreditasi merupakan bagian dari hasil sistem penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal dapat memilih baik ISO ataupun BAN PT, pelaksanaan kedua akreditasi ini seharusnya dilaksanakan sinkronisasi agar saling melengkapi dan tidak berlangsung secara terpisah (Budiarto, G., Yulianda, F., & Zulbainarni 2018). Adopsi standar yang lebih tinggi seperti ISO dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi (Legowo, M. B., & Indiarso 2017).

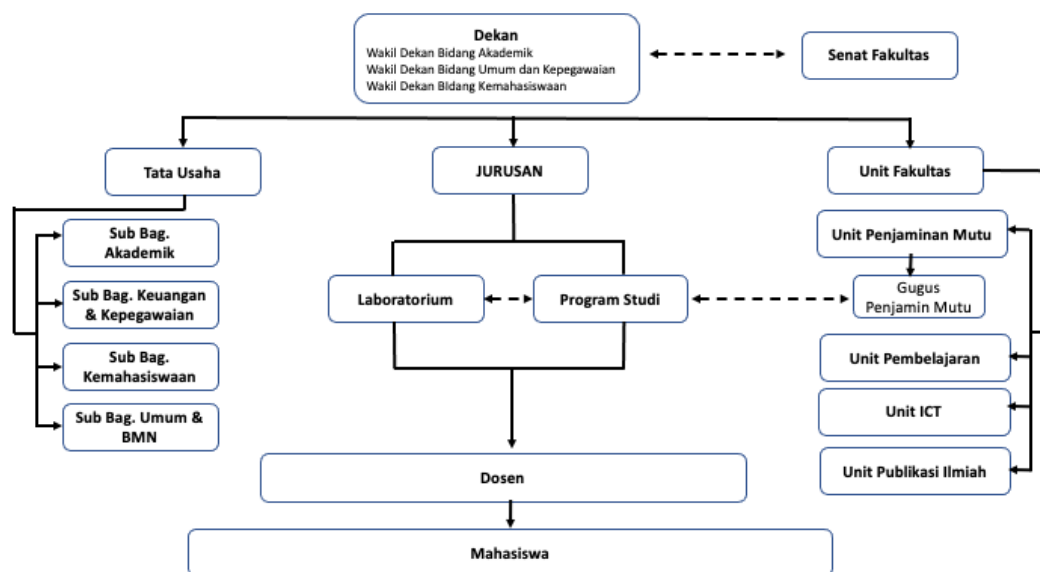
Mulai tahun 2019 telah dimulai sosialisasi dan kemudian diterapkan kriteria baru untuk akreditasi sebuah prodi, hal ini diatur dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. Akreditasi prodi merupakan salah satu pertanggungjawaban pengelolaan sebuah prodi kepada Dikti untuk menjamin mutu pendidikan serta laporan kepada stakeholder sebagai tanggungjawab atas proses pendidikan yang pada akhirnya pada pengakuan status ijazah yang dimiliki.

Mekanisme akreditasi eksternal merupakan hasil dari proses secara berkelanjutan pelaksanaan standar yang akan dicapai. Harapannya status akreditasi adalah cerminan dari kualitas proses yang akan menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan level akreditasi yang dicapai. Harapan positifnya adalah dengan adanya budaya mutu maka akan dilahirkan prodi-prodi yang bermutu dan memiliki level status akreditasi yang unggul.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan secara khusus membentuk tim Penjaminan mutu Fakultas dengan beranggotakan dosen dosen dan staf yang ditugaskan berdasarkan SK Dekan. Selanjutnya tim ini disebut dengan Tim

penjaminan Mutu Fakultas yang secara berkala dilegitimasi dengan SK Dekan setiap 1 tahun (Sk Dekan nomor

0293/UN22.6/KP/2019, 0525/UN22.6/KP/2020, dan SK Dekan nomor 0026/UN22.6/KP/2021).



Gambar 1 Struktur Organisasi FKIP Universitas Tanjungpura

Tim penjaminan mutu ini secara aktif memiliki tugas untuk mencermati perkembangan akreditasi prodi (28 prodi) dengan rincian satu (1) prodi D3, 19 Prodi S1 dan 7/8 Prodi S2. Jumlah prodi yang besar menjadikan tugas Unit penjaminan mutu menjadi lebih besar. Namun demikian berdasarkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi serta Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT yaitu Proses reakreditasi otomatis setiap 5 tahun, menjadi permasalahan tersendiri.

Akreditasi merupakan tanggung jawab Fakultas sebagai unit pengelola, bersama dengan Program studi sebagai unit pelaksana maka dengan adanya SK Dekan terhadap keberadaan Unit Penjaminan Mutu, maka

setidaknya Prodi dengan segenap sumber daya yang ada bersama dengan Dekanat dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas secara bersama sama menjaga dan berupaya meningkatkan status level akreditasi prodi-prodi.

### Implementasi SPMI atau Pelaksanaan Penjaminan Mutu FKIP

Implementasi SPMI atau Pelaksanaan Penjaminan Mutu Di FKIP yang sudah dilaksanakan (kegiatan tahun 2019 – 2021, pelaksanaan akreditasi), sedang dilakukan (kegiatan Tahun 2021, Instrumen dan monev PPG, data Penelitian dan PKM, proses D3 Perpustakaan) dan kegiatan akan dilakukan dalam waktu dekat (persiapan akreditasi Internasional Prodi Kimia S1).

#### Kegiatan Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Hasil Kegiatan	Keterangan Kegiatan
1	Kegiatan Visitasi Akreditasi Prodi Pendidikan Fisika	21 s.d 23 Februari 2019	Peringkat Akre "B" Skor 344	No SK : 0906/UN2 2.6/AK/20 19

2	Kegiatan Tim Review Buku Teks/Buku Ajar Dosen FKIP	05 Agustus 2019	Telah terbit 26 Judul Buku ber ISBN dari berbagai Bidang Ilmu dari Dosen di Prodi masing-masing	No SK : 3602/UN2 2.6/PJ.00.01/2019
3	Kegiatan Visitasi Akreditasi Prodi Pendidikan Kimia	5 s.d 7 September 2019	Peringkat Akre "A" Skor 367	No SK : 4199/UN2 2.6/JM.01/2019
4	Kegiatan Visitasi Akreditasi Prodi Pendidikan Matematika S2 FKIP	20 s.d 22 Oktober 2019	Peringkat Akre "B" Skor 321	No SK : 5062/UN2 2.6/JM.01/2019
5	Penelitian UPMF Penyusunan Instrumen Penelitian Kepuasan Layanan Internal Fkip Untan	19 November 2019	Instrument yang disusun dinyatakan valid dan reliable Dapat dilihat pada Laporan Penelitian	Penelitian Kelompok Tim
6	Penelitian UPMF Perencanaan Strategis FKIP Untan	18 November 2019	Dapat dilihat pada Laporan Penelitian	Penelitian Kelompok Tim
7	PKM UPMF Workshop Penyusunan Payung/Kawasan Penelitian Program Studi Di Lingkungan FKIP Untan	20 November 2019	Dapat dilihat pada Laporan PKM	Penelitian Kelompok Tim
8	PKM UPMF Sosialisasi Sembilan Kriteria Penilaian BAN-PT untuk Program Studi	19 November 2019	Dapat dilihat pada Laporan PKM	Penelitian Kelompok Tim

### Kegiatan Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Hasil Kegiatan	Keterangan Kegiatan
1	Kegiatan Tim Review Buku Teks/Buku Ajar Dosen FKIP	03 Agustus 2020	Telah terbit 51 Judul Buku ber ISBN dari berbagai Bidang Ilmu dari Dosen di Prodi masing-masing	No SK : 3468/UN2 2.6/PB/2020

2	Kegiatan Visitasi Akreditasi Prodi S2 Pend. Bahasa Inggris	6 s.d 7 Juli 2020	Peringkat Akre "A" Score 361	No SK : 2933/UN2 2.6/AK/2020
3	Kegiatan Visitasi Akreditasi Prodi S2 Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD)	10 s.d 11 Agustus 2020	Peringkat Akre "B" Score 319	No SK : 3464/UN2 2.6/AK/2020
4	Kegiatan Visitasi Akreditasi Prodi S1 Pend. Bahasa Inggris	14 s.d 15 September 2020	Peringkat Akre "A" Score 361	No SK : 3949 /UN22.6/ AK/2020
5	Penelitian UPMF Kepuasan Civitas Akademika Terhadap Layanan Internal Fkip Universitas Tanjungpura	24 November 2020	Dapat dilihat pada Laporan Penelitian	Penelitian Kelompok Tim
6	Penelitian <i>stracer study</i> UPMF Kepuasan Lulusan, <i>Stakeholder</i> dan Mitra Terhadap Layanan yang diberikan FKIP Universitas Tanjungpura	23 November 2020	Dapat dilihat pada Laporan Penelitian	Penelitian Kelompok Tim
7	Penelitian UPMF Sosialisasi Penilaian Angka Kredit Tahun 2020	22 November 2020	Dapat dilihat pada Laporan Penelitian	Penelitian Kelompok Tim
8	Pemetaan Luaran Tri Dharma Dosen dan Mahasiswa Program Studi FKIP Universitas Tanjungpura	18 Desember 2020	Dapat dilihat pada Laporan Kegiatan	Penelitian Kelompok Tim
9	Revisi SOP Bidang Pendidikan, Penelitian dan PKM UPMF FKIP Untan Tahun 2020	19 Desember 2020	Dapat dilihat pada Laporan Kegiatan	Penelitian Kelompok Tim
10	Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) FKIP Untan	20 Desember 2020	Dapat dilihat pada Laporan Kegiatan	Penelitian Kelompok Tim
11	Evaluasi Roadmap Penelitian dan PKM Program Studi di Lingkungan FKIP Untan	20 Desember 2020	Dapat dilihat pada Laporan Kegiatan	Penelitian Kelompok Tim
12	Sosialisasi 9 Kriteria untuk Program Studi yang berakhir Masa Kadaluwarsa Akreditasi di Tahun 2021	21 Desember 2020	Dapat dilihat pada Laporan Kegiatan	Penelitian Kelompok Tim

### Kegiatan Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Hasil Kegiatan	Keterangan Kegiatan
1	Kegiatan Visitasi Akreditasi Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG)	29 s.d 30 Maret 2021	Peringkat Akre "Baik"	No SK : 2295/UN2 2.6/AK/2021

2	Kegiatan Tim Review Buku Teks/Buku Ajar Dosen FKIP	28 Mei 2021	Telah selesai	No SK : 2369/UN2 2.6/PB/20 21
3	Penelitian UPMF Evaluasi Visi Misi Fakultas oleh Sivitas Akademika FKIP	19 April 2021	Telah selesai	Penelitian Kelompok Tim
4	PKM UPMF Sosialisasi Visi Misi FKIP Untan Tahun 2021	20 April 2021	Telah selesai	Penelitian Kelompok Tim

Dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara operasional harus di dukung oleh dokumen standar sampai dengan SOP. Kaitan dengan hal ini setidaknya terdapat beberapa kendala yang telah terjadi dan sedang berlangsung. Kendala yang telah terjadi diantaranya: menjadi sebuah persepsi bahwa Akreditasi merupakan pelaporan kegiatan selama 3 tahun terakhir dan berujung pada dokumen. Hal ini menyebabkan terjadinya penyediaan dokumen untuk memenuhi setiap standar. Dapat dikatakan bahwa kebiasaan untuk tertib administrasi dan bekerja menggunakan acuan standar belum terbiasa. Hal yang dilakukan terhadap permasalahan ini maka telah dilakukan penyediaan dokumen seperti yang dituntut dalam setiap standar akreditasi. Unit penjaminan Mutu Fakultas, menyusun, mengumpulkan atau membuat dokumen yang diperlukan dan di distribusikan ke setiap prodi.

Kedua pemahaman tentang standar Akreditasi setiap Kaprodi dan dosen Bervariasi. Untuk mengatasi hal ini maka Unit penjaminan mutu secara aktif melakukan sosialisasi, pendampingan tentang pengisian borang, simulasi akreditasi. Hasil dari kegiatan ini terjadi persamaan persepsi tentang pengisian borang dan minimal prediksi nilai.

FKIP merupakan Fakultas yang memiliki 28 prodi dengan jumlah dosen 214 dengan distribusi dosen per prodi dengan rasio dosen dan mahasiswa tidak merata. Di beberapa program studi seperti D3 Perpustakaan, S2 PGSD, S1 PGSD, S2 Sisiologi, S1 sosiologi, masih kekurangan dosen home base. Kekurangan dosen home base ini menjadi permasalahan tersendiri menjelang ajang akreditasi. Terhadap permasalahan ini dilakukan bongkar pasang status dosen home base 1 tahun sebelum akreditasi prodi. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SPMI atau Penjaminan Mutu di Fakultas yang masih belum teratasi.

No	Kendala	Alternatif Tawaran Solusi
1	9 kriteria menjadi kendala, prodi menjadi malas dengan adanya akreditasi otomatis (terjadi diskontinuitas proses menjaga mutu)	Seharusnya ada mekanisme untuk memaksa civitas akademika untuk beroreintasi kerja berbasis luaran atau tuntutan kriteria akreditasi
2	Kaitan dengan kriteria ke-9 yaitu luaran mahasiswa khususnya tri darma perguruan tinggi belum ada kejelasan jumlah yang diharuskan dan alokasi.	Penyusunan standar yang akan dicapai dalam tri dharma perguruan tinggi di level Universitas yang akan diturunkan sampai ke level prodi

		kaitan dengan luaran Dosen dan mahasiswa (revisi standar)
3	Instrument <i>tracer study</i> belum terintegrasi dari universitas sampai ke Prodi	Alur komunikasi informasi Penjaminan mutu Universitas ke Fakultas/Prodi kaitan dengan Instrument <i>tracer study</i>
4	IKU kaitan dengan Akreditasi Universitas sebagai acuan belum ada	Penyusunan IKU universitas menyesuaikan 9 kreteria akreditasi
5	Sinkronisasi IKU manajemen dengan IKU Akreditasi dan renstra (Universitas, Fakultas dan Prodi)	Penyusunan dokumen IKU
6	Belum seragam diadakan revisi visi misi keterkaitan dengan perubahan visi misi Universitas	Penyediaan kegiatan untuk melakukan <i>workshop</i> visi misi setiap prodi
7	Pemahaman terhadap 9 kriteria baru masih belum	Sosialisasi 9 kriteria dengan penekanan terhadap pemenuhan yang harus dipenuhi

Kaitan dengan hal ini maka ketersediaan informasi yang mudah untuk diakses adalah suatu kebutuhan yang mendasar. Sehingga seperti pada rekomendasi beberapa hasil penelitian berikut memberikan gambaran bahwa sistem informasi dengan disain perangkat lunak akan memberikan sistem informasi sesuai kebutuhan penjaminan mutu (Nuraeni 2010). Selanjutnya dengan sistem informasi yang akan mempermudah alur komunikasi dokumen yang telah dilakukan setiap unit di perguruan tinggi (Fitrah 2018). Kesiapan dokumen dan komunikasi informasi yang baik sangat mempermudah proses penyediaan dokumen. Sistem informasi dalam SPIM akan lebih mudah jika dibangun sistem terintegrasi yang mudah untuk diakses (Atmaja, A. P., & Azis 2019).

Sehingga dengan adanya fasilitas sistem informasi yang baik akan terjadi pemahaman secara bersama terhadap data harus tersistem dengan baik, sehingga siapapun yang menjadi pejabat akan secara cepat memahami alur proses penjaminan mutu yang sedang berlangsung (Pipin Widyaningsih 2014). Hal ini jika dilakukan maka baik budaya ataupun kegiatan mutu yang telah berlangsung tidak akan berubah siapapun yang menduduki jabatan. Ketika pada suatu saat dilakukan audit mutu internal maka, audit mutu dilakukan oleh

auditor yang kompeten di dukung dengan perangkat lunak untuk membantu proses evaluasi (Darmawan, A., & Hasibuan 2014). Sehingga proses Audit mutu akan berlangsung dengan lancar.

### III. SIMPULAN

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi diperoleh melalui akreditasi eksternal dalam menjamin keberhasilan akreditasi eksternal diperlukan upaya institusi untuk menjamin mutu manajemen secara komprehensif melalui SPMI. Berdasarkan uraian di atas penerapan sistem penjaminan mutu baik di Fakultas dan Prodi merupakan hal penting untuk meningkatkan mutu secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban institusi terhadap stakeholders. Sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan stakeholders.

Kendala yang dihadapi penjaminan mutu internal adalah tidak adanya ketersediaan dokumen dan sistem informasi data yang terintegrasi dari Universitas sampai ke prodi yang mengakibatkan pemahaman terhadap akreditasi yang masih kurang. Seharusnya ada mekanisme untuk memaksa civitas akademika untuk berorientasi kerja berbasis luaran atau tuntutan kriteria akreditasi dan berdasarkan kebutuhan stake holders saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, O. 2019. "Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 3(1): 161–69.
- Atmaja, A. P., & Azis, A. 2019. "Sistem Informasi Terintegrasi Evaluasi Kegiatan Mengajar Dosen Sebagai Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal." *Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi dan Informatika* 9(1): 1–6.
- Budiarto, G., Yulianda, F., & Zulbainarni, N. 2018. "Strategi Sinkronisasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dengan ISO 9001 Program Sarjana IPB." *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)* 4(2): 202–202.
- Darmaji, D., Supriyanto, A., & Timan, A. 2019. "Sistem Penjaminan Mutu Internalsekolah Untuk Menin." (*Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*)*gkatkan Mutu Lulusan. JMSP* 3(3): 130–36.
- Darmawan, A., & Hasibuan, M. S. 2014. "Analisis Dan Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Audit Mutu Internal Dan Dokumentasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Generic." *Generic* 9(2): 342–47.
- Fadhli, M. 2020. "Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Ekstenal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi." *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4(2): 53–65.
- Fitrah, M. 2018. "Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi." *Jurnal Penjaminan Mutu* 4(1): 76–86.
- Haryono, H., Budiyono, B., Istyarini, I., Wardi, W., & Ardiantoro, A. 2019. "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang." *Jurnal PANJAR: Pengabdian Bidang Pembelajaran* 1(1): 17–22.
- Legowo, M. B., & Indiarso, B. 2017. "Model Sistem Penjaminan Mutu Berbasis Integrasi Standar Akreditasi BAN-PT Dan ISO 9001: 2008. (), 1(2).," *Jurnal RESTI : Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi* 1(2): 90–98.
- Nuraeni, Y. 2010. "Perancangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Bidang Sumber Daya Manusia." *Jurnal Sistem Informasi* 6(1): 32–43.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT
- Peraturan Dekan FKIP Untan Nomor 176/UN22.6/OT/2018 tentang Organisasi dan Tatakerja FKIP Untan
- Pipin Widyaningsih. 2014. "Desain Aplikasi Knowledge Management System Untuk Mendukung Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Menggunakan Pendekatan User Centered Design (Studi Kasus LPJM STMIK Duta Bangsa Surakarta)." *Duta.Com* 7(2).
- Sulaiman, A., & Wibowo, U. B. 2016. "Implementasi Sistem Penjaminan



- Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada.” *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 4(1): 17–32.
- Supriyono, S. 2018. . “Analisa Sistem Penjaminan Mutu Internal Pembiayaan Perguruan Tinggi Dengan Pendekatan Gap Analysis (Studi Kasus: Perguruan Tinggi X).” *JITMI (Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri)* 1(1): 29–36.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Willar, D., Linton, J., & Kaparang, R. 2015. “Identifikasi Profil Budaya Organisasi Yang Mendukung Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.” *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 34(2).